



ICW Laporkan Anggaran Siluman Ke KPK

Balai Kota, Warta Kota

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan dana siluman APBD DKI Jakarta 2014 dan 2015 yang diusulkan DPRD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (26/3). Dalam laporannya ke KPK, ICW membawa dua kardus berisi berkas-berkas atau dokumen.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan, dokumen tersebut berisi bukti-bukti dugaan anggaran siluman terkait APBD DKI yang juga pernah dilaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke lembaga anti-rasuah itu. Termasuk data-data kejanggalan di SKPD pendidikan di DKI Jakarta.

"ICW sebagai yang peduli dengan transparansi gerakan pemberantasan korupsi, melaporkan beberapa dugaan korupsi ke KPK. Terutama untuk sektor pendidikan di DKI," ujar Firdaus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

Menurut Firdaus, data yang dimiliki ICW berupa dokumen kontrak, proses lelang, penunjukan, pembentukan harga, dan pemilihan pemenang lelang. ICW menduga, ada pejabat Pemprov DKI bersama rekanannya serta anggota DPRD terlibat anggaran siluman itu.

Dugaan korupsi terjadi di lima mata anggaran, yakni pengadaan buku, UPS, scanner, printer 3D dan alat fitness. Selain rekanan dan pejabat Pemprov DKI, ICW juga meminta KPK memeriksa dugaan keterkaitan anggota Komisi E DPRD DKI untuk kasus anggaran siluman ini. Dari hasil investigasi ICW terhadap APBD DKI usulan DPRD tahun 2014 dan 2015, baik APBD biasa ataupun perubahan, ditemukan adanya kejanggalan.

Ratusan miliar

ICW menaksir, kerugian negara sementara ini mencapai

Rp 278 miliar. "Jumlah itu termasuk di dalamnya UPS, printer scan tiga dimensi, ada buku, dan ada beberapa lagi dugaan paket kegiatan, terutama dinas pendidikan 2004," kata Firdaus.

Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mendukung laporan ICW tersebut. "Ya nggak apa-apa, bagus dong. Semu temuan harus dilaporkan," kata Taufik di Gedung DPRD, kemarin petang.

Namun, Taufik menegaskan, bahwa anggaran itu baru sebatas usulan. Justru ia berharap laporan ICW tersebut murni untuk pencegahan korupsi, tanpa ada unsur lainnya.

"Kalau saya tanya sama ahli hukum itu namanya jerat angin. Barang itu belum jadi, APBD itu belum jadi, lho. APBD itu dari kita, dikonsultasikan ke Kemendagri. Mondar-mandir belum jadi. Saya kira mudah-mudahan yang melaporkannya itu murni jangan ada unsur-unsur lain. Ini kan kadang kala laporannya ada unsur-unsur lain," tegasnya.

Berbentuk pokir

Ahok secara terpisah, kemarin, membeberkan total anggaran siluman dalam APBD 2012-2015 mencapai Rp 43,6 triliun. Anggaran siluman itu, kata Ahok, muncul dalam bentuk pokok pikiran (pokir) yang diajukan DPRD DKI dan tak pernah diusulkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebelumnya. "Sebenarnya, (pengadaan) UPS (uninterruptible power supply) ini cuma segelintir dari bentuk pokir DPRD," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (26/3).

Selain pengadaan alat catu daya listrik dengan jumlah fantastis, kata Ahok, banyak pengadaan perangkat lain yang tak masuk akal. Misalnya, pengadaan alat scanner dan printer 3D di sekolah-sekolah di DKI, digital education, serta perangkat sains

modern.

Anggaran siluman itu banyak ditemukan dalam APBD 2014 oleh Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Sudin Dikmen) Jakarta Barat.

Beberapa sekolah yang tercatat menerima semua perangkat canggih tersebut adalah SMAN 78, SMAN 85, dan SMAN 23.

Terdapat pula pengadaan enam seri buku milik anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, Rina Aditya Sartika. Satu seri buku dianggarkan sebanyak Rp 500 juta, totalnya mencapai Rp 3 miliar. Nilai anggaran siluman dalam bentuk pokir DPRD yang ditemukan pada Sudin Dikmen Jakarta Barat mencapai Rp 536 miliar dengan realisasi Rp 481,2 miliar.

Di sisi lain, pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing berpendapat, masyarakat perlu mengkritik Ahok terkait etika dan normanya yang dianggap buruk. Menurut Emrus, masyarakat yang mau mengkritik Ahok justru sayang dan peduli kepada pemimpinnya.

"Tidak saja mendukung upayanya memberantas korupsi, tetapi juga mengkritik saat ia mengeluarkan kata-kata yang tak beretika. Ketika kita mengkritik Ahok, itu menunjukkan rasa sayang kita kepada pemimpin kita," kata Emrus usai rapat Hak Angket DPRD untuk menyelidiki etika Ahok di Gedung DPRD DKI, kemarin. (suf)

Total Pokir DPRD dari APBD 2012-2015:

1. Pokir DPRD APBD 2012 Rp 6.460.762.176.871
 2. Pokir DPRD APBD 2012 Perubahan Rp 2.500.414.935.746
 3. Pokir DPRD APBD 2013 Rp 5.022.670.238.585
 4. Pokir DPRD APBD 2013 Perubahan Rp 3.407.212.526.893
 5. Pokir DPRD APBD 2014 Rp 8.475.518.296.370
 6. Pokir DPRD APBD 2014 Perubahan Rp 5.717.183.426.007
 7. Pokir DPRD RAPBD 2015 Rp 12.076.102.401.855.
- Total: Rp 43.659.864.002.327.**